

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Penyajian Laporan Keuangan

Menurut Wikipedia:

“Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu lembaga pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja suatu lembaga.”

Menurut Hongren (2007:25) menyatakan bahwa :

Laporan keuangan merupakan dokumen yang melaporkan tentang kondisi perusahaan dalam istilah moneter dan menyediakan informasi untuk membantu dalam membuat keputusan berdasarkan informasi tersebut, sedangkan penyajian laporan keuangan merupakan tahapan penyampaian data keuangan termasuk didalamnya catatan atas laporan keuangan yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya atau kewajiban suatu entitas pada suatu periode tertentu, ataupun informasi akuntansi yang berhubungan kepada pihak yang membutuhkan untuk mendukung tindakan mereka dalam mengambil keputusan usaha.

Menurut Belkaoui (2006:221) meyatakan bahwa :

Kualitatif dari laporan keuangan adalah relevansi dan materialitas, bentuk dan substansi, keandalan, kebebasan dari bias, komparabilitas, konsistesnsi, dan dapat dimengerti. Dari karakteristik tersebut dapat dijelaskan bahwa laporan keuangan hendaknya sebagian besar didasarkan pada kebutuhan para pengguna laporan. Informasi hendaknya sejauh mungkin bebas dari bias pembuatnya. Dalam melakukan pengambilan keputusan, para pengguna hendaknya tidak hanya memahami informasi yang disajikan namun juga hendaknya mampu menilai keandalannya dan membandingkannya dengan informasi mengenai peluang-peluang alternatif dan pengalaman sebelumnya.

Dari pengertian diatas maka penilti dapat menyimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan adalah tahapan penyampaian informasi keuangan perusahaan/lembaga kepada pihak yang membutuhkan untuk mendukung tindakan mereka dalam mengambil suatu keputusan.

Menurut Fadli (2017) menyatakan bahwa

“Penyajian laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting. Pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan.”

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Menurut Mardiasmo (2002:201) :

“Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan.”

Penyajian laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting, dan merupakan suatu pokok untuk menciptakan transparansi fiskal dan akuntabilitas. Menurut PP No. 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa tujuan laporan keuangan adalah :

- a. akuntabilitas, mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- b. manajemen, membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

Menurut PP No. 71 tahun 2010 karakteristik laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya, adapun karakteristik kualitas laporan keuangan tersebut yaitu:

1. Relevan, yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut :

- a. Manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
 - b. Manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
 - c. Tepat waktu (*timeliness*). Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
 - d. Lengkap, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.
2. Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut:
 - a. Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
 - b. Dapat diverifikasi (*verifiability*). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
 - c. Netralitas, yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
 3. Dapat dibandingkan, yaitu Informasi akuntansi harus dapat diperbandingkan dengan informasi akuntansi periode sebelumnya pada perusahaan yang sama, atau dengan perusahaan sejenis lainnya pada periode waktu yang sama.
 4. Dapat dipahami, yaitu Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD setiap entitas baik pemerintah pusat, kementerian negara/lembaga, pemerintah daerah dan satuan kerja di tingkat pemerintah pusat/daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pemerintah pokok terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Laporan Operasional

- d. Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Neraca
- f. Laporan Arus Kas (LAK) dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

Menurut Nordiawan (2010:34) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan terdiri dari :

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan

2.1.2 Aksesibilitas Laporan Keuangan

Pengertian aksesibilitas (*accessibility*) dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hal yang dapat dijadikan akses atau hal yang dapat dikaitkan.

Pentingnya penerapan akuntansi keuangan yang baik dan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi tersebut sangat menentukan tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Mardiasmo (2002:167) menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan.

Dari pengertian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan merupakan suatu akses yang memudahkan mereka yang ingin menggunakan informasi laporan keuangan.

Berdasarkan Undang-undang No33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyatakan bahwa :

“Informasi yang dimuat dalam sistem informasi keuangan daerah merupakan data terbuka yang dapat diketahui, diakses, dan diperoleh

masyarakat. Hal tersebut berarti bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada publik atas laporan keuangan yang dihasilkannya.”

Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Menurut Mardiasmo (2002:174) menyatakan bahwa :

“Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan (*accountability* dan *stewardship*).”

Menurut Shende (2004:73) menyatakan bahwa :

Dalam kondisi masyarakat sekarang, akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan *website* (internet), serta forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat. Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip akuntabilitas, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, tidak sekedar menyampaikannya ke DPRD saja, tetapi juga memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa dimensi aksesibilitas sangat berkaitan dengan media massa dan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Pemerintah daerah juga di haruskan membuat laporan keuangan yang lengkap sehingga informasi yang ingin disampaikan dapat mudah dimengerti oleh masyarakat. Dengan demikian pemerintah harus memenuhi :

1. Keterbukaan yaitu laporan keuangan yang dihasilkan harus terbuka melalui media massa
2. Kemudahan yaitu pemerintah harus memberikan kemudahan kepada stakeholder dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan
3. Ketersediaan informasi yaitu pemerintah harus menyampaikan informasi secara jelas dan lengkap

Dikeluarkannya UU No22 dan 2R Tahun 1999 telah melahirkan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik. Untuk itu, pemerintah daerah maupun OPD yang mereka miliki dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan dan menyampaikan informasi keuangan tersebut secara transparan kepada publik. Selain itu laporan keuangan tersebut hendaknya mudah diperoleh masyarakat dengan biaya murah.

2.1.3 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Menurut Halim (2007:71) menyatakan bahwa :

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut.

Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) No.589/IX/6/Y/99 menyatakan bahwa :

Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak/berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Oleh karena itu, pemberlakuan undang-undang otonomi daerah harus dapat meningkatkan daya inovatif dari pemerintah daerah untuk dapat memberikan laporan pertanggung jawaban mengenai pengelolaan keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas kepada DPRD maupun masyarakat luas.

Menurut Shende (2004:33) menyatakan bahwa :

“Kualitas Pemerintahan Daerah yang baik (*good governance*) tidak hanya ditentukan oleh akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan supremasi hukum. Namun, kualitas pemerintahan yang baik juga ditentukan

oleh faktor-faktor lain seperti *responsiveness, consensusorientation, equity efficiency, effectiveness* dan *strategic vision*.”

Menurut Mardiasmo (2009:86) menyatakan bahwa :

Dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi publik antara lain, yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum yaitu akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
2. Akuntabilitas Proses yaitu terkait dengan apakah prosedur yang telah digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.
3. Akuntabilitas Program yaitu terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas Kebijakan yaitu terkait dengan pertanggungjawaban pembina, pengurus dan pengawas atas kebijakan-kebijakan yang diambil.

Berdasarkan PP No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa :

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pemerintah daerah harus bisa mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah. Bentuk pertanggungjawaban dapat berupa penyajian laporan keuangan daerah yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang ada, serta kemudahan publik dalam mengakses laporan keuangan pemerintah. Hal tersebut dilakukan agar publik (badan pemeriksa, masyarakat, maupun investor) dapat mengontrol pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya kontrol yang baik diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini akan dilampirkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yang ditampilkan dalam bentuk tabel 2.1:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

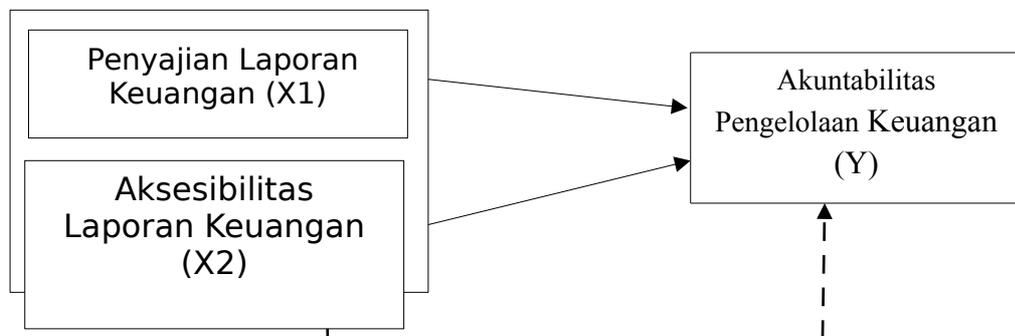
No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul	Variabel	Hasil
1.	Miftahul Reza Fauziyah (2017)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD	Dependen: 1. Transparansi Keuangan 2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Independen: 1. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan 2. Aksesibilitas Laporan Keuangan	Secara parsial atau bersama-sama penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah SKPD
2.	Siti Aliyah dan Aida Nahar (2012)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan.	Dependen: 1. Transparansi Keuangan 2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Independen: 1. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan 2. Aksesibilitas Laporan Keuangan	Baik secara parsial atau simultan penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
3.	Muhammad Riza Fadli (2017)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Pengungkapan Laporan Keuangan	Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Independen: 1. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan 2. Aksesibilitas	penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sedangkan pengungkapan laporan keuangan berpengaruh

		terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan.	Laporan Keuangan 3. Pengungkapan Laporan Keuangan	secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan
4.	Nur Azizah, Junaidi, Azhdiar Redy Setiawan (2014)	Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan serta Sistem Pengendalian Intern terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kota Bandung.	Dependen: 1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan 2. Transparansi Pengelolaan Keuangan Independen: 1. Penyajian Laporan Keuangan 2. Aksesibilitas Laporan Keuangan 3. Sistem Pengendalian Intern	Penyajian laporan keuangan dan Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah tetapi aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tetapi sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan
5	Sukhemi (2011)	Pengaruh Aksesibilitas dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah	Dependen : Akuntabilitas Keuangan Daerah Independen : 1. Aksesibilitas Laporan Keuangan 2. Pengungkapan Laporan Keuangan	Aksesibilitas laporan keuangan berpeharuh positif secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Sedangkan pengungkapan laporan keuangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan
6	Ika Arifanny Subekti, Fahmi Rizani, Rifqi Novriyandan	Pengaruh Kualitas Penyajian Laporan Keuangan dan	Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	Secara parsial penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh

	a (2015)	Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD	Independen: 1. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan 2. Aksesibilitas Laporan Keuangan	positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
7	Salomi J. Hahenusssa (2015)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD	Dependen: 1. Transparansi Keuangan 2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Independen: 1. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan 2. Aksesibilitas Laporan Keuangan	Secara parsial atau bersama-sama penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
8	Wahida (2015)	Pengaruh Kualitas Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Independen: 1. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan 2. Aksesibilitas Laporan Keuangan	Secara parsial dan simultan penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
9	Ridho Riyansa, Yunilma, Poppy Fauziati (2016)	Pengaruh Kualitas Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Independen: 1. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan 2. Aksesibilitas Laporan Keuangan	Penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan, Sedangkan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

10	Riyan Eriko Zama (2016)	Pengaruh Kualitas Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Independen: 1. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan 2. Aksesibilitas Laporan Keuangan	Secara parsial dan simultan penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
----	-------------------------	--	---	--

2.3 Kerangka Pemikiran



Sumber: Penulis, 2018

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang teridentifikasi sebagai masalah yang diteliti (Sugiyono, 2012). Sebagai dasar merumuskan hipotesis berikut kerangka pemikiran teoritis yang menunjukkan pengaruh antar variabel :

2.3.1 Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Penelitian yang dilakukan Miftahul (2017) menyimpulkan bahwa Penyajian Laporan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Hasil penelitian yang dilakukan Aliyah, dkk (2012) menyatakan bahwa bahwa Penyajian Laporan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Dari

uraian di atas, maka Penyajian Laporan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.3.2 Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Penelitian yang dilakukan Miftahul (2017) menyatakan bahwa Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Penelitian yang dilakukan Aliyah (2012) menyatakan bahwa Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

2.3.3 Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Penelitian yang dilakukan Riza (2017) dan Nur Azizah, dkk (2014) menyatakan bahwa Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.4 Hipotesis Penelitian

H₁ : Terdapat pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

H₂ : Terdapat pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

H₃ : Terdapat pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah